



Honor Pegawai Akan Dibayarkan Nontunai

YOGYA, TRIBUN- Pembayaran honorarium pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan dilaksanakan dengan transaksi nontunai. Rencananya hal ini akan dilakukan pada semester dua tahun 2017 ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yog-

yakarta, Kadri Renggono mengatakan, penerimaan transaksi nontunai pada tahun 2018 akan diawali dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, yaitu penerimaan retribusi pasar tradisional secara nontunai.

"Penerapan transaksi nontunai ini akan diawali dengan pembayar-

an honorarium pegawai di tahun ini. Bagian Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta sebenarnya sudah mengawali pembayaran honorarium secara nontunai sejak tahun lalu dan hasilnya cukup bagus," jelasnya. Selasa (16/5).

● ke halaman 14

Honor Pegawai Akan Dibayarkan

● Sambungan Hal 13

Dia menjelaskan, pihaknya juga akan mengembangkan transaksi nontunai ke pembayaran lainnya. Misalnya, untuk anggaran pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas. Untuk menerapkan sistem transaksi nontunai juga membutuhkan dukungan dari bank, misalnya saja BPD DIY dan Bank Jogja.

Implementasi transaksi nontunai pada pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari

2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.

"Transaksi nontunai dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet, giro, dan uang elektronik atau sejenisnya," jelasnya.

Di dalam surat edaran tersebut juga dinyatakan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat dilakukan secara bertahap dengan membatasi penggunaan uang tunai dalam transaksi penerimaan atau pengeluaran.

Dalam penerapan transaksi nontunai, Pemerintah Kota Yogyakarta mencontoh Pemerintah DKI Jakarta. Sejumlah efisiensi yang dapat dilakukan Pemerintah DKI Jakarta karena menerapkan transaksi nontunai di antaranya biaya perawatan ken-

daraan dinas pada 2016 tercatat sebanyak Rp55 miliar atau berkurang jauh dibanding 2014 sebesar Rp125 miliar.

Adapun anggaran jamuan makanan dari Rp570 miliar pada 2014 berkurang menjadi Rp394 miliar pada 2016, dan anggaran bahan bakar minyak turun dari Rp238 miliar pada 2014 menjadi Rp187 miliar pada 2016.

Meski demikian, pihaknya tidak serta-merta menjadikan contoh itu menjadi satu-satunya patokan tanpa pertimbangan. Pihaknya tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Yogyakarta dalam menentukan transaksi tersebut.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyono menyatakan, Pemkot Yogyakarta akan menerapkan transaksi nontunai mulai semester dua tahun ini

terutama untuk pengeluaran dengan nilai lebih dari Rp5 juta.

Transaksi nontunai, sebutnya memiliki keunggulan dibanding transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, di antaranya proses dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sehingga, akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat.

"Transaksi pun dapat dilakukan lebih efisien. Kami akan terus memperluas cakupan atau penerapan transaksi nontunai pada 2018 dengan dukungan dari perbankan yang ada di Kota Yogyakarta khususnya bank lokal," jelasnya.

Sulistyono menambahkan, transaksi non tunai ini juga untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005